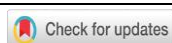


INTERNALISASI NILAI DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SEKOLAH

Moch. Syaiful Rijal¹, M. Arif Bakhtiar², Innayatul laili³, Ayu Maya Damayanti⁴

^{1,2,3,4} Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Email: syaifulrijal604@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1523>

Sections Info

Article history:

Submitted: 15 October 2025

Final Revised: 17 November 2025

Accepted: 21 November 2025

Published: 30 December 2025

Keywords:

Pancasila Educatio

Pancasila Democracy

Value Internalization

School Learning

Merdeka Curriculum



ABSTRAK

This article aims to analyze the process of internalizing the values of Pancasila Democracy through Pancasila Education learning in schools as an effort to develop students' democratic character. Pancasila Education plays a strategic role in instilling democratic values, particularly those embodied in the fourth principle of Pancasila, so that they are not only understood conceptually but also implemented in students' attitudes and behavior in everyday life. This study employs a qualitative approach using a literature review method, with data sources consisting of scholarly journal articles, academic books, and relevant educational policy documents. The data were analyzed using content analysis techniques to examine concepts, strategies, and practices related to the internalization of Pancasila Democratic values in learning. The results indicate that the internalization of democratic values is carried out through the integration of democratic principles into the curriculum, the application of participatory learning methods such as Problem-Based Learning, Project-Based Learning, simulations, and deliberative discussions, as well as the strengthening of a democratic school culture. The discussion emphasizes that the role of teachers as facilitators and democratic role models, the support of the Merdeka Curriculum, and adaptation to the challenges of the digital era are key factors in the successful internalization of these values.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah sebagai upaya pembentukan karakter demokratis peserta didik. Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, khususnya sila keempat Pancasila, agar tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diimplementasikan dalam sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dengan sumber data berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengkaji konsep, strategi, serta praktik internalisasi nilai Demokrasi Pancasila dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai demokrasi dilakukan melalui integrasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kurikulum, penerapan metode pembelajaran partisipatif seperti Problem Based Learning, Project Based Learning, simulasi, dan diskusi deliberatif, serta penguatan budaya sekolah yang demokratis. Pembahasan menegaskan bahwa peran guru sebagai fasilitator dan teladan demokrasi, dukungan Kurikulum Merdeka, serta adaptasi terhadap tantangan era digital menjadi faktor penting dalam keberhasilan internalisasi nilai.

Kata kunci: Pendidikan Pancasila, Demokrasi Pancasila, Internalisasi Nilai, Pembelajaran di Sekolah, Karakter Demokratis, Kurikulum Merdeka.

PENDAHULUAN

Peran penting dari pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk generasi baru yang memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terutama nilai demokrasi, yang merupakan sila keempat dari Pancasila. Nilai-nilai demokrasi ini menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta partisipasi dan musyawarah yang aktif. Studi menunjukkan bahwa siswa harus secara sistematis internalisasi nilai Pancasila melalui pembelajaran bermakna di sekolah agar nilai tersebut tidak hanya diingat, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. (Malaka Safrizal, 2020)

Pendidikan Pancasila di sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara kepada siswa sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami nilai demokrasi, yang merupakan inti dari sila keempat Pancasila, siswa harus lebih dari sekedar memahaminya dengan kata-kata. Nilai-nilai ini harus ditanamkan dalam kehidupan siswa melalui pendidikan yang bermakna, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip musyawarah, keterlibatan aktif, dan penghormatan pada hak asasi sebagai perilaku demokratis baik di sekolah maupun di masyarakat. Studi tentang internalisasi nilai Pancasila menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai ideologis ini dalam interaksi sosial mereka di sekolah, bukan hanya sebagai gagasan teoretis. Ini dicapai melalui pembelajaran formal yang terstruktur dan kontekstual. Misalnya, penelitian oleh Safrizal, Sanusi, Ruslan, dan Maimun menemukan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dapat membuat nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari cara siswa berpikir dan bertindak setiap hari, bukan hanya bahan pelajaran yang diajarkan di kelas. (Malaka Safrizal, 2020)

Namun, internalisasi nilai demokrasi Pancasila dalam pembelajaran tidak selalu berjalan dengan baik. Masalah seperti keterbatasan pendekatan pedagogis dan implementasi kurikulum sering menjadi penghalang. Misalnya, guru harus lebih inovatif saat membuat rencana pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam ingatan siswa. Mereka juga harus mendorong siswa untuk menerapkan demokrasi dalam kehidupan nyata di lingkungan sekolah mereka. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa kita perlu memahami lebih banyak tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi menjadi bagian dari pendidikan formal.

Sangat penting untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pendidikan Pancasila mampu menginternalisasikan nilai demokrasi dalam kehidupan siswa. Sebagai bagian integral dari Pancasila, nilai-nilai demokrasi membutuhkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini diperlukan agar siswa tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut tetapi juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka di sekolah dan di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek pemahaman, pengalaman, dan pembiasaan dalam berbagai konteks pendidikan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi demokrasi Pancasila sangat bergantung pada bagaimana pembelajaran dirancang, dijalankan, dan dikontekstualisasikan oleh guru di sekolah, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan pada keadaan kehidupan nyata siswa.

Nurhadianto menjelaskan bahwa penguatan aktivitas pendukung di lingkungan pendidikan dapat membantu siswa internalisasi nilai-nilai Pancasila. Ini dapat dicapai melalui pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi dalam seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Nilai-nilai Pancasila dapat disampaikan tidak hanya sebagai materi pelajaran, tetapi juga dihidupkan dalam pengalaman belajar yang bermanfaat bagi

siswa melalui proses pembelajaran yang terorganisir. Dengan arahan yang jelas, pembelajaran membantu guru membuat strategi pembelajaran yang berfokus pada penanaman nilai. Ini memungkinkan proses internalisasi berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Metode ini membantu siswa tidak hanya memahami prinsip-prinsip konseptual dan normatif Pancasila, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan nyata di sekolah. Secara keseluruhan, internalisasi nilai ini menumbuhkan karakter peserta didik yang selaras dengan identitas bangsa, terutama dengan menanamkan sikap tanggung jawab, toleransi, dan kesadaran demokratis. (Nurhadianto, 2016) Oleh karena itu, pembelajaran Pancasila memiliki peran strategis dalam membangun budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, kekurangan penelitian masih terlihat karena penelitian belum sepenuhnya berkonsentrasi pada penerapan nilai demokrasi Pancasila secara khusus, terutama di sekolah menengah atas (SMA). Banyak penelitian internalisasi membahas prinsip-prinsip Pancasila secara umum, tetapi mereka mengabaikan cara siswa SMA menerapkan dan memahami demokrasi dalam berbagai konteks pembelajaran. Kondisi ini membuat lebih banyak penelitian dilakukan untuk melihat praktik demokrasi Pancasila dalam pendidikan Pancasila. Ini mencakup hal-hal seperti kurikulum, metode pembelajaran, budaya sekolah, dan elemen lingkungan lainnya yang berkontribusi terhadap proses internalisasi nilai tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih spesifik yang dapat memperkuat internalisasi nilai demokrasi Pancasila oleh siswa. Pada akhirnya, ini akan mendukung pembentukan karakter demokratis generasi bangsa.

Ada beberapa penelitian yang melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dalam pembelajaran umum atau berdasarkan profil siswa Pancasila. Namun, tidak banyak penelitian yang membahas secara khusus bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila ditanamkan dalam kurikulum formal sekolah menengah. Hal ini menjadi celah penelitian yang penting karena nilai demokrasi, yang merupakan pilar penting dalam kehidupan nasional, perlu dipelajari lebih lanjut dalam konteks penerapannya dalam pembelajaran di sekolah. Gagasan ini mendorong penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai demokrasi diinternalisasi dalam pendidikan Pancasila. (Septiani & Kurniawan, 2022)

Oleh karena itu, fokus utama artikel ini adalah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam konteks pengajaran Pancasila di sekolah. Fokus ini mencakup bagaimana prinsip demokrasi dimasukkan ke dalam kurikulum, metode pembelajaran yang efektif, dan bagaimana hal ini berdampak pada pemahaman dan perilaku demokratis siswa. Diharapkan bahwa pembahasan ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk menciptakan pendidikan Pancasila yang lebih relevan dan sesuai dengan zaman saat ini.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan dan menganalisis bagaimana nilai demokrasi Pancasila ditanamkan dalam pelajaran Pancasila di sekolah. Artikel ini juga menggambarkan metode pembelajaran yang telah digunakan selama ini, dan memberikan saran untuk perbaikan kebijakan dan metode pembelajaran. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pendidik, peneliti, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat internalisasi nilai demokrasi bagi siswa melalui pembelajaran yang relevan dan signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara

mendalam konsep dan proses internalisasi nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui kajian terhadap berbagai literatur ilmiah, seperti artikel jurnal nasional terakreditasi, buku akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih dari literatur yang kredibel dan dapat diakses dalam bentuk dokumen PDF agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci “Demokrasi Pancasila”, “Pendidikan Pancasila”, “internalisasi nilai”, dan “pembelajaran di sekolah” pada basis data ilmiah seperti Google Scholar dan repositori jurnal perguruan tinggi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)** dengan cara mengkaji dan menafsirkan gagasan, konsep, serta temuan penelitian terkait internalisasi nilai Demokrasi Pancasila. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan **triangulasi sumber** dengan membandingkan berbagai literatur yang memiliki fokus kajian serupa, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang utuh dan objektif mengenai internalisasi nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pengajaran Pancasila di sekolah telah diupayakan melalui integrasi prinsip-prinsip demokrasi ke dalam kurikulum, strategi pembelajaran, serta aktivitas pembelajaran di kelas. Kurikulum Pancasila tidak hanya menekankan penguasaan konsep normatif, tetapi juga mendorong pengembangan sikap dan perilaku demokratis siswa. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, tanggung jawab, dan partisipasi aktif tercermin dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, serta kompetensi yang diharapkan (Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, 2021).

Dari sisi metode pembelajaran, guru cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat partisipatif dan dialogis, seperti diskusi kelompok, debat terarah, studi kasus, simulasi musyawarah, serta pembelajaran berbasis proyek. Metode-metode tersebut memberi ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, dan mengambil keputusan secara kolektif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif lebih efektif dalam menanamkan nilai demokrasi dibandingkan pembelajaran yang bersifat satu arah (Salsabila, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai demokrasi Pancasila membuat siswa lebih memahami demokrasi secara teoretis dan bertindak dengan cara yang lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu karakteristik penting dari warga negara demokratis adalah kecenderungan peserta didik yang mengikuti pendidikan Pancasila yang secara konsisten menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi. Peserta didik ini cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, mampu bekerja sama dalam kelompok, dan menunjukkan tanggung jawab untuk membuat keputusan bersama. Selain itu, temuan lain mendukung gagasan bahwa pembelajaran yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi melalui pendekatan partisipatif dan dialogis dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama sosial dan musyawarah yang lebih luas di lingkungan sekolah. Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka (Giawa, 2024). Oleh karena itu, pendidikan Pancasila tidak hanya membantu siswa menguasai materi tetapi juga membangun sikap dan perilaku demokratis mereka. Ini secara

implisit membuat sekolah menjadi laboratorium demokrasi mini di mana siswa belajar tentang toleransi, musyawarah, dan partisipasi aktif dalam situasi sosial yang sebenarnya.

Pembahasan

Integrasi Prinsip Demokrasi Pancasila dalam Kurikulum Pengajaran Pancasila

Di sekolah, internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah upaya sistematis untuk membangun karakter bangsa yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berbicara, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan. Untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami demokrasi secara teoretis tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari—sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap hak orang lain, dan keterlibatan aktif dalam keputusan sekolah—dibutuhkan integrasi prinsip-prinsip demokrasi ke dalam program pendidikan dan aktivitas. Oleh karena itu, agar pembentukan karakter demokratis siswa dapat terjadi secara menyeluruh, sekolah sebagai laboratorium demokrasi harus mengintegrasikan nilai-nilai kerakyatan dan prinsip kebijaksanaan ke dalam setiap aspek pendidikannya, termasuk kurikulum, metode, dan budaya sekolah (Alifia Hesty Yulita Putri et al., 2025).

1. Relevansi Kurikulum Merdeka dalam Internalisasi Demokrasi

Kurikulum yang berfokus pada pembelajaran partisipatif dan kontekstual sangat penting untuk internalisasi nilai demokrasi Pancasila karena menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung dalam pengalaman pembelajaran yang mencakup diskusi, pengambilan keputusan kolektif, dan kerja sama kelompok. Ini adalah contoh praktik demokrasi di lingkungan sekolah. Studi menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokratis, tetapi juga memperoleh sikap demokratis seperti toleransi terhadap perbedaan, keterlibatan aktif, dan kehidupan bermusyawarah (Rahman & Irayanti, 2025). Oleh karena itu, dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi melalui model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mungkin untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan progresif. Ini berarti bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai referensi teoretis tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah nilai dalam kehidupan siswa.

2. Prinsip Musyawarah sebagai Inti Demokrasi di Kelas

Komponen utama demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat, dan kelas adalah tempat paling strategis untuk menyebarkan budaya ini. Mengubah pola komunikasi yang otoriter menjadi komunikatif dan dialogis adalah cara untuk memasukkan prinsip musyawarah ke dalam kurikulum pengajaran. Guru mendorong siswa untuk mencapai kesepakatan bersama melalui diskusi, bukan paksaan, atau mengikuti suara terbanyak tanpa mempertimbangkan keinginan minoritas.

Dasar demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat, yang merupakan sila keempat. Kurikulum menggabungkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan pembelajaran berbasis proyek (PjBL). Diskusi kelompok membantu siswa belajar menghargai pendapat orang lain, menemukan solusi untuk perbedaan, dan membuat keputusan kolektif tanpa tekanan. Ketika guru memberi siswa ruang yang setara untuk berbicara, siswa cenderung lebih toleran terhadap keberagaman. Hal ini menunjukkan bahwa mengajar tentang demokrasi jauh lebih efektif daripada berbicara satu arah. Siswa yang belajar bermusyawarah di kelas akan lebih cenderung menolak kekerasan saat menyelesaikan

masalah (Astuti & Wibawa, 2025).

3. Transformasi Peran Guru sebagai Role Model Demokrasi

Peran guru harus berubah secara signifikan dari menjadi penguasa kelas menjadi menjadi fasilitator dan teladan hidup (role model). Hal ini diperlukan untuk internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dibandingkan dengan dulu, guru dipandang sebagai satu-satunya sumber otoriter kebenaran. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai motivator yang mampu menciptakan lingkungan yang adil dan terbuka. Perubahan peran ini sangat penting karena perilaku guru di kelas merupakan kurikulum tersembunyi, yang siswa pelajari lebih cepat daripada materi tertulis. Ketika seorang guru memberikan perhatian dengan adil, menghargai pendapat yang berbeda, dan terbuka untuk kritik, ia secara tidak langsung menanamkan demokrasi dalam benak siswanya.

Peran guru harus diubah agar prinsip demokrasi dapat dimasukkan ke dalam pelajaran. Guru harus berfungsi sebagai fasilitator dan contoh nilai demokratis daripada hanya memiliki kekuasaan tunggal di kelas. Guru mengajarkan siswa untuk menghormati hak setiap orang dan bekerja sama dalam pengambilan keputusan dengan memfasilitasi diskusi, membiarkan siswa menyampaikan pendapat mereka, dan menanggapi kritik dan pertanyaan. Oleh karena itu, guru tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga menunjukkan bagaimana menghormati hak asasi manusia, seperti kesetaraan, dan partisipasi yang adil dalam proses pendidikan. Akibatnya, karakter demokratis siswa dibentuk dan mereka memiliki kesempatan untuk bersuara setara dalam berbagai konteks interaksi sosial dan akademik (Gea et al., 2026).

Pada akhirnya, guru yang menunjukkan contoh demokrasi akan menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga kuat sebagai warga negara. Siswa yang dibesarkan di bawah bimbingan pendidik yang berprinsip demokrasi akan terbiasa bertoleransi, berani membela kebenaran, dan menyadari kesetaraan gender dan sosial. Transformasi ini adalah kunci keberhasilan program pendidikan Pancasila, karena teladan seorang guru adalah bukti paling akurat bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya menjadi slogan di bendera.

4. Tantangan Digitalisasi dan Etika Berpendapat

Internalisasi nilai demokrasi Pancasila di era digital yang berkembang pesat saat ini semakin sulit. Ini karena batasan yang kabur antara ruang privat dan publik. Digitalisasi telah memberikan kebebasan yang luar biasa bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi seringkali kebebasan ini tergelincir menjadi anarki informasi tanpa memiliki kesadaran moral yang kuat. Ajar siswa untuk membedakan antara kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dengan tindakan provokatif seperti hoax, ujaran kebencian, dan perundungan siber adalah tantangan utama dalam kurikulum sekolah. Tidak mengantisipasi fenomena ini akan merusak dasar demokrasi Pancasila, yaitu persatuan dan kebinekaan.

Di era teknologi yang semakin maju, kurikulum sekolah harus mencakup demokrasi dan literasi digital berdasarkan nilai Pancasila agar siswa memahami hak kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral dan hukum yang menyertainya saat berinteraksi dengan ruang publik digital. Sehingga kebebasan berpendapat di media sosial tidak menjadi ancaman terhadap persatuan dan kehidupan bermasyarakat yang baik, siswa dengan literasi digital yang kuat dapat menyaring informasi secara kritis, membedakan hoaks dan misinformasi, dan berpartisipasi secara sehat dalam diskusi online. Studi menunjukkan bahwa memasukkan literasi digital ke dalam pembelajaran kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila dapat membantu siswa menjadi pengguna media digital yang lebih bertanggung jawab dan bermartabat (Aris Tantowi & Widiyanto, 2024). Dalam konteks

demokrasi pendidikan ini, literasi digital sangat penting. Ini berarti bahwa sekolah harus mengajarkan siswa berpikir kritis, menilai informasi, dan beretika dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan memungkinkan siswa tidak hanya mempelajari teknologi tetapi juga menggunakan kebebasan mereka dengan bijak dan sesuai dengan prinsip "hikmat kebijaksanaan" yang terkandung dalam Pancasila.

Seiring dengan kemajuan teknologi, demokrasi harus menjadi bagian dari kurikulum. Ini juga harus mencakup cara orang berbicara di ruang digital. Siswa harus belajar bahwa etika musyawarah di kelas harus diterapkan pada media sosial. Kurikulum saat ini menekankan pada literasi digital, di mana kebebasan berbicara harus diimbangi dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, demokrasi Pancasila tetap relevan meskipun teknologi berkembang, menghasilkan warga negara yang cerdas di dunia nyata dan bijak di dunia maya.

Metode Pembelajaran yang Efektif dalam Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila

Untuk menginternasionalkan demokrasi di sekolah, diperlukan strategi pembelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar materi teks. Pendidikan kewarganegaraan harus mencakup tiga domain utama: pengetahuan kewarganegaraan (civil knowledge), sikap kewarganegaraan (civil disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civil skills). Ini dilakukan agar siswa tidak hanya memahami demokrasi tetapi juga mampu menerapkannya secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut penelitian, nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kerja sama, hormat, dan penghargaan dimasukkan ke dalam pembelajaran kewarganegaraan. Nilai-nilai ini dapat mempengaruhi perilaku demokratis siswa ketika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus dirancang secara kontekstual (Salsabila, 2024). Selain itu, pembelajaran yang mendorong diskusi kelompok, penyelesaian masalah, dan refleksi kritis meningkatkan keterampilan sipil siswa. Ini membantu mereka berpikir rasional, berpartisipasi dalam diskusi demokratis, dan membuat keputusan secara kolektif dalam komunitas dan lingkungan sekolah mereka. Pendidikan demokrasi yang menyeluruh yang melibatkan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa sangat penting untuk membangun warga negara yang aktif, toleran, dan bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi yang berkembang.

1. Metode *Problem Based Learning* (PBL) dan Analisis Kasus

Salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif untuk internalisasi nilai demokrasi adalah pembelajaran berdasarkan masalah (PBL). Pendekatan ini meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis dan partisipasi mereka dalam pembelajaran kewarganegaraan Pancasila. Selain itu, menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. PBL juga mendorong mereka untuk terlibat dalam penyelesaian masalah nyata daripada hanya menerima informasi pasif di kelas (Rosfiani et al., 2024).

Guru menyajikan masalah nyata, seperti konflik sosial di lingkungan sekitar atau masalah pengambilan keputusan kebijakan publik, dan siswa kemudian diminta untuk menyelesaikannya berdasarkan Pancasila. Di sini, nalar kritis siswa diasah untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak bias. Siswa tidak hanya diminta untuk menghafal definisi demokrasi, tetapi juga diminta untuk berpikir tentang cara mencapai konsensus di tengah perbedaan kepentingan yang tajam. Karena mereka terbiasa memverifikasi data dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang sebelum membuat kesimpulan, tindakan ini secara tidak langsung membangun karakter yang tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dangkal.

Pembelajaran Berbasis Problem (PBL) adalah salah satu pendekatan pembelajaran

yang sangat baik karena membantu siswa menghubungkan pelajaran di kelas dengan realitas sosial di luar sekolah dan menanamkan nilai-nilai demokrasi secara kontekstual. PBL memungkinkan siswa menghadapi masalah nyata dalam kehidupan mereka, seperti konflik sosial sederhana, masalah hak dan tanggung jawab dalam masyarakat, atau dilema etika dalam pengambilan keputusan. Dalam menyelesaikan tugas, metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, bernegosiasi, dan menghargai pendapat teman sekelompoknya. Ini pada gilirannya meningkatkan keterampilan demokratis seperti komunikasi, toleransi, dan pengambilan keputusan kolektif. Dalam pendidikan kewarganegaraan, penelitian menunjukkan bahwa PBL dapat membangun budaya demokrasi di kelas dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Tahapan PBL memungkinkan siswa untuk lebih aktif menyampaikan pendapat mereka dan menghormati pendapat orang lain saat menyelesaikan masalah Bersama (Hadi, 2021).

2. *Project Based Learning* (PjBL) melalui Suara Demokrasi

Metode pembelajaran berbasis proyek (PjBL) adalah inovasi pedagogis yang memberi peserta didik kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Ini membuat keterlibatan siswa dalam pembelajaran tidak hanya teoretis tetapi juga kontekstual, sesuai dengan situasi dunia nyata. PjBL membantu siswa berpikir kritis, bekerja sama, kreatif, dan bertanggung jawab sosial. Ini membantu mereka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang berkaitan dengan masalah atau tantangan yang mereka temui di sekolah dan di masyarakat. Pendekatan berbasis proyek selaras dengan tujuan Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan karena menekankan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan yang bermakna dan bernilai kebangsaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dan meningkatkan penguasaan nilai demokrasi. Hal ini terjadi karena siswa tidak hanya menerima pelajaran secara pasif, tetapi juga terlibat dalam pengalaman belajar yang menantang dan menantang (Novitasari, 2023). Oleh karena itu, PjBL adalah metode pembelajaran yang berguna yang membantu siswa mempersiapkan diri mereka untuk menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Itu juga membantu mereka mempelajari nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman hidup mereka sendiri.

Dengan menggunakan PjBL, nilai-nilai demokrasi dapat diimplementasikan secara fisik dan emosional daripada hanya abstrak. Kelebihan PjBL terletak pada kemampuan untuk menjadi warga negara yang baik. Siswa belajar berorganisasi, berbicara sopan di depan umum, dan menerima kekalahan secara sportif. Tidak seperti membaca buku teks tentang teori demokrasi, pengalaman-pengalaman ini merupakan internalisasi yang jauh lebih kuat.

Pengembangan keterampilan musyawarah dan kolaborasi adalah komponen penting dari pendekatan ini. Siswa yang belajar PjBL harus bekerja dalam tim yang beragam, mendengarkan argumen orang lain, dan mencari solusi untuk masalah yang muncul selama proyek. Di sinilah Sila Keempat Pancasila diinternalisasi secara mendalam oleh siswa. Mereka belajar bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan kebijaksanaan kolektif memiliki legitimasi moral yang lebih kuat daripada hanya mengikuti suara mayoritas tanpa berbicara. PjBL mengajarkan siswa bahwa demokrasi bukan hanya tentang memenangkan suara; itu adalah tanggung jawab bersama untuk menguntungkan semua orang di komunitas atau kelompok sekolah.

Selain itu, metode PjBL melalui Suara Demokrasi sangat cocok untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Sebagai penyelenggara proyek, siswa harus belajar mengelola informasi dan sumber daya secara terbuka. Hal ini

memberikan pelajaran penting tentang etika kepemimpinan dan kepercayaan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, PjBL tidak hanya mendidik siswa dengan pemahaman teknis tentang demokrasi, tetapi juga mendidik mereka menjadi orang yang jujur, toleran, dan memiliki keberanian moral untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masa depan bangsa dan negara mereka.

3. Metode Simulasi dan *Role Playing*

Metode simulasi dan *role playing* (bermain peran) merupakan strategi pembelajaran yang sangat efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila karena kemampuannya dalam menghadirkan pengalaman emosional dan psikologis yang mendalam bagi peserta didik. Karena metode ini dapat memberi peserta didik pengalaman yang mendalam secara emosional dan psikologis. Metode ini mengubah ruang kelas menjadi tempat interaksi sosial di mana siswa tidak hanya belajar tentang teori kedaulatan rakyat, tetapi juga "menghidupkan" peran-peran sebagai warga negara. Melalui simulasi, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata, sehingga siswa dapat merasakan beban tanggung jawab dan akibat dari setiap keputusan yang dibuat dalam sistem masyarakat yang demikian.

Selain itu, bermain peran dan simulasi merupakan metode pembelajaran yang sangat membantu dalam menumbuhkan rasa empati, yang merupakan salah satu syarat demokrasi yang sehat. Ini karena mereka memungkinkan siswa untuk terlibat dalam interaksi sosial yang nyata dan melihat cara orang lain melihat dunia. Misalnya, siswa dapat bertindak sebagai tokoh masyarakat dalam situasi tertentu yang menuntut mereka berpikir kritis tentang perasaan dan keputusan orang lain. Ini mengajarkan mereka menghargai sudut pandang berbeda dan membangun keterampilan sosial seperti empati, kerja sama, dan komunikasi yang baik. Menurut penelitian, memasukkan peran dalam pendidikan dapat membantu guru membangun empati siswa dengan memberi mereka pengalaman nyata yang mengaitkan peran dengan refleksi sosial. Pada akhirnya, ini meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan sosial dan nilai moral dalam pendidikan kewarganegaraan (Lusiani, 2025).

Siswa mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan di tengah perbedaan kepentingan. Mempelajari nilai-nilai demokrasi secara kontekstual membantu mereka memahami pentingnya kompromi dan diplomasi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penerapan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum dan RPP, yang menekankan toleransi, kebebasan berpendapat, kerja sama, dan saling menghargai, siswa memperoleh pemahaman bahwa demokrasi adalah tentang menggabungkan berbagai perspektif untuk mencapai kebaikan bersama. Studi menunjukkan bahwa menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan dapat membuat siswa lebih terbiasa menghargai perbedaan pendapat, membuat mereka lebih baik dalam bekerja sama dalam kelompok, dan membuat proses pengambilan keputusan kolektif sebagai pengalaman yang bermanfaat dalam demokrasi Pancasila (Salsabila, 2024).

4. Diskusi Deliberatif: Memperkuat Budaya Musyawarah

Salah satu pendekatan pembelajaran yang paling penting untuk internalisasi demokrasi Pancasila adalah diskusi deliberatif, yang berpusat pada pencapaian kesepakatan melalui diskusi yang mendalam, rasional, dan setara. Diskusi deliberatif mendorong siswa untuk mendengarkan satu sama lain, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan mencapai konsensus di tengah perbedaan. Sebaliknya, debat biasanya menghasilkan pemenang melalui adu argumen yang saling menjatuhkan. Metode ini berhasil menghilangkan budaya dominasi mayoritas di kelas dan menggantinya dengan budaya yang lebih inklusif yang menghargai setiap suara. Ini adalah implementasi nyata dari prinsip

kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, di mana pertimbangan yang bijaksana digunakan untuk membuat keputusan daripada suara terbanyak.

Dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, diskusi deliberatif bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui pembicaraan yang adil dan mendalam, di mana siswa belajar menghargai pendapat satu sama lain dan menghargai kontribusi aktif setiap siswa. Metode ini memungkinkan siswa untuk berbagi ide, saling memberi respons, dan menimbang berbagai sudut pandang. Ini menumbuhkan keterampilan sosial mereka dan menumbuhkan rasa toleran terhadap perbedaan pendapat dalam proses musyawarah mufakat di sekolah. Ketika siswa belajar tentang demokrasi melalui diskusi kelompok dan musyawarah, mereka dapat mempelajari nilai-nilai demokrasi seperti berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Ini adalah dasar penting untuk membangun warga negara yang demokratis (Aulia & Dewi, 2022).

Melalui diskusi deliberatif, siswa dilatih untuk internalisasi nilai. Ini mengajarkan mereka untuk mempertimbangkan berbagai perspektif secara rasional dan menggunakan alasan rasional. Kualitas keputusan dalam sistem demokrasi Pancasila sangat bergantung pada kebijaksanaan kolektif yang dicapai melalui diskusi yang terbuka dan berpikir kritis, di mana setiap suara dihargai dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan bersama. Terbukti bahwa pendidikan kewarganegaraan yang menggabungkan metode diskusi demokratis membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan pendapat serta memperoleh keterampilan berpikir kritis sebagai bagian dari internalisasi nilai-nilai demokrasi di sekolah. Di kelas, diskusi deliberatif sangat penting untuk membangun sikap inklusif siswa dan mengajarkan mereka menghargai martabat manusia dalam interaksi sosial. Siswa dilatih untuk menyampaikan pendapat secara etis, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencapai kesepakatan melalui musyawarah melalui kebiasaan berdiskusi yang rasional dan berbasis fakta. Dalam demokrasi Pancasila, pendekatan ini relevan karena kualitas keputusan tidak ditentukan oleh dominasi suara mayoritas, tetapi oleh keadilan dan kebijaksanaan kolektif yang dihasilkan dari proses percakapan yang setara. Diskusi deliberatif juga membantu siswa mempertahankan diri dari polarisasi dan informasi sepihak di era digital. Ini membantu mereka menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter (Putri et al., 2024).

5. Pembelajaran Berbasis Media Digital dan Literasi Kewarganegaraan

Pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menggunakan media digital sekarang menjadi keharusan strategis untuk menjembatani nilai-nilai konvensional demokrasi dengan kenyataan kehidupan generasi muda di internet. Ini memungkinkan siswa mempelajari nilai-nilai demokrasi Pancasila dengan cara yang lebih interaktif, inovatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi digitalisasi membawa tantangan baru, seperti banjir informasi dan polarisasi digital. Oleh karena itu, metode ini harus disertai dengan penguatan literasi kewarganegaraan digital. Tujuan dari literasi ini adalah agar siswa tidak hanya dapat menggunakan teknologi tetapi juga menjadi orang yang berpikir kritis, bertanggung jawab, dan beradab saat berinteraksi di ruang publik virtual.

Untuk mengajarkan demokrasi di era disrupsi, siswa harus dididik untuk menggunakan media digital dengan bijak. Metode pendidikan kewarganegaraan harus mengajarkan etika digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan gagasan tentang kewarganegaraan digital, yang menekankan bahwa siswa harus memiliki kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengemukakan pendapat secara tanggung jawab sambil menghormati hak dan martabat orang lain dalam ruang publik digital (Yusuf et al., 2024). Bagaimana nilai-nilai Pancasila membentuk etika bersosial di era digital, sehingga penggunaan media digital yang bebas tidak menimbulkan polarisasi sosial

yang merugikan, menunjukkan betapa pentingnya mengakui bahwa kebebasan berpendapat di internet harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan moral Pancasila (Mohamad Januar Supriyatno Januar, 2020). Sebagai sarana simulasi berdemokrasi, guru dapat memanfaatkan media sosial, platform diskusi online, atau membuat konten digital. Siswa diarahkan untuk menerapkan kebiasaan berkomunikasi yang didasarkan pada rasa saling menghargai dan musyawarah. Misalnya, siswa belajar bahwa kebebasan berpendapat di internet memiliki batasan moral dan hukum yang sama dengan yang ada di dunia nyata melalui kampanye digital yang positif atau diskusi grup yang terarah. Dengan pengetahuan ini, kita tahu bahwa nilai "hikmat kebijaksanaan" yang terkandung dalam sila keempat Pancasila harus tetap menjadi kompas utama, bahkan jika kita tidak berbicara satu sama lain. Siswa dididik untuk menjadi warga digital yang aktif dan mampu mempertahankan bangsa di tengah disrupsi informasi.

Selain itu, literasi kewarganegaraan digital mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan membedakan berita bohong (hoax). Di sinilah teknologi digital berfungsi untuk melindungi demokrasi. Siswa diberi instruksi untuk memverifikasi data dan memahami bagaimana setiap konten yang mereka bagikan mempengaruhi keharmonisan sosial. Pada akhirnya, tujuan internalisasi nilai Pancasila melalui media digital adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bermartabat. Demokrasi Pancasila akan berkembang sebagai ideologi yang dinamis dan fleksibel hanya jika sekolah dapat menggabungkan teknologi dengan literasi moral yang kuat. Dengan demikian, demokrasi Pancasila akan dapat menyatukan masyarakat Indonesia baik di dunia nyata maupun virtual.

Dampak Internalisasi Nilai Demokrasi Pancasila terhadap Pemahaman dan Perilaku Siswa

Penerapan prinsip Demokrasi Pancasila di lingkungan sekolah bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses pengembangan karakter yang berkelanjutan. Sekolah berfungsi sebagai laboratorium demokrasi mini yang mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang taat hukum.

1. Transformasi Pemahaman Konseptual Siswa

Proses internalisasi nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah bergantung pada transformasi pemahaman konseptual. Pada titik ini, perspektif siswa tentang demokrasi berubah secara signifikan. Mereka mulai memahami dan memahami konsep-konsep tersebut. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai sarana untuk mentransformasikan pengetahuan teoritis, kesadaran menjadi pribadi yang mendalam. Siswa tidak hanya mempelajari definisi demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", tetapi mereka juga mulai memahami makna filosofis di baliknya, yang unik untuk bangsa Indonesia.

Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam transformasi pemahaman siswa dari sekadar menghafal definisi menjadi pemahaman yang lebih mendalam. Siswa diajari oleh prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan bahwa demokrasi Indonesia bergantung pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan daripada hanya pemungutan suara (Asmaroini, 2017). Perubahan ini mencakup perubahan perspektif tentang pengambilan keputusan. Setelah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, siswa mulai memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai konteks. Sebelumnya, mereka mungkin berasumsi bahwa keputusan terbaik didukung oleh jumlah suara terbanyak. Mereka mulai menyadari bahwa kelompok minoritas masih dapat didengarkan dan dihargai dalam mencapai kesepakatan bersama. Ini menghasilkan pola pikir yang lebih inklusif di

mana siswa belajar untuk menemukan solusi untuk perbedaan daripada hanya mengejar kepentingannya. Efektif pertama yang terlihat adalah peningkatan literasi hukum dan politik. Siswa mulai memahami bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Karena siswa diberi kesempatan untuk mengaitkan materi pelajaran dengan situasi sosial nyata di lingkungan mereka, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dirancang secara kontekstual dapat membantu mereka memahami pentingnya menghargai perbedaan dan menjadi lebih toleran terhadap berbagai perspektif (Sari et al., 2024). Setelah memahami fondasi filosofis ini, siswa melihat demokrasi sebagai kebebasan tanpa batas. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai kebebasan yang dibatasi oleh hak orang lain, nilai-nilai kemanusiaan, dan ketuhanan.

Secara keseluruhan, pemahaman konsep ini berubah menjadi pendewasaan berpikir. Siswa memiliki kompas internal yang kuat untuk menavigasi kehidupan sosial mereka jika mereka memahaminya dengan benar. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang menyadari haknya, tetapi mereka juga menjadi orang yang cerdas saat bergabung dengan masyarakat yang heterogen.

2. Internalisasi melalui Budaya Sekolah dan Pembelajaran Praktis

Internalisasi nilai demokrasi tidak akan berhasil jika hanya diajarkan di kelas. Praktik pembelajaran yang nyata dan budaya sekolah yang konsisten adalah cara terbaik untuk menghidupkan nilai-nilai ini. Sekolah berfungsi sebagai komunitas kecil di mana siswa belajar berorganisasi, berinteraksi, dan menyelesaikan konflik secara demokratis sebelum bergabung dengan masyarakat umum. Pembelajaran berbasis proyek tidak hanya mengajarkan siswa materi, tetapi juga mengajarkan mereka prinsip-prinsip demokrasi, seperti berbicara dengan baik, terlibat dalam diskusi, menghargai pendapat orang lain, dan membuat keputusan bersama. Metode pendidikan ini juga mendorong siswa untuk bekerja sama, berbicara, dan berpikir tentang perbedaan pendapat dalam dunia nyata (Faslia, 2023).

Pemilihan ketua OSIS atau pengurus kelas adalah salah satu praktik demokrasi paling nyata di sekolah. Proses ini bukan sekadar simulasi politik, tetapi merupakan alat yang sangat efektif untuk mengajar. Siswa belajar tentang proses pemilihan yang jujur dan adil, cara menyebarkan program kerja kandidat, dan pentingnya menerima keputusan mayoritas dengan hormat. Praktik-praktik seperti ini mengajarkan siswa bahwa kepemimpinan demokrasi adalah amanah yang bersumber dari kepercayaan bersama dari kekuasaan otoriter. Karena pembelajaran kewarganegaraan menanamkan keterampilan sosial seperti kolaborasi, penghargaan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas bersama, yang diwujudkan dalam interaksi sehari-hari di kelas dan kegiatan kelompok, siswa yang terbiasa hidup dalam lingkungan sekolah yang demokratis cenderung menunjukkan perilaku yang lebih inklusif dan mampu bekerja sama dengan berbagai kelompok (Annisa Dwi Hamdani¹, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku demokratis tumbuh karena siswa diberi kesempatan untuk mencoba nilai-nilai ini pada skala kecil.

Internalisasi yang dihasilkan dari praktik ini juga mencakup partisipasi siswa dalam aktivitas sosial dan gotong royong di lingkungan sekolah. Nilai Demokrasi Pancasila yang sangat menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial dipraktikkan melalui kerja sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Sekolah berhasil menerapkan praktik demokratis yang inklusif dengan mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam keberagaman. Siswa tidak hanya memiliki kecerdasan kognitif yang tinggi, tetapi mereka juga memiliki keterampilan sosial yang kuat dan mampu berinteraksi dengan orang lain, yang merupakan ciri utama warga negara demokratis.

3. Pengembangan Sikap Kritis dan Tanggung Jawab Sosial

Internalisasi nilai Demokrasi Pancasila menyebabkan munculnya keseimbangan

antara pemikiran yang tajam dan kepedulian moral. Dua pilar utama, pengembangan sikap kritis dan tanggung jawab sosial, menunjukkan bahwa siswa memahami demokrasi sebagai nilai moral dan bukan hanya praktik. Pendidikan Pancasila mendorong siswa untuk menjadi orang yang tidak hanya mampu menerima informasi, tetapi juga mampu menganalisis setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka.

Sikap kritis yang dibangun oleh siswa dalam situasi ini tidak berarti sikap yang skeptis atau suka membantah tanpa alasan. Sebaliknya, sikap kritis merujuk pada kemampuan siswa untuk berpikir secara objektif, rasional, dan berdasarkan prinsip keadilan. Siswa dididik untuk menganalisis ketidakadilan, menemukan bias, dan menemukan solusi atas masalah sosial di lingkungan mereka. Berpikir kritis membantu siswa melindungi diri dari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa, seperti hasutan, berita bohong (juga dikenal sebagai hoaks), dan paham-paham radikal. Mereka menemukan bahwa berdemokrasi berarti memanfaatkan kebijaksanaan untuk kepentingan bersama daripada memaksakan keinginan pribadi.

Pengembangan tanggung jawab sosial ini mengajarkan siswa bahwa tindakan mereka berdampak pada orang lain. Hal ini sangat berkaitan dengan cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Siswa yang bertanggung jawab sosial akan sangat berhati-hati dalam bertindak agar mereka tidak melanggar hak orang lain atau mengganggu umum. Dalam skala yang lebih luas, ini mendorong semangat gotong royong, yang merupakan inti dari Demokrasi Pancasila. Mereka mulai sadar bahwa kesuksesan kolektif jauh lebih berharga daripada kesuksesan individualis. Kemampuan siswa untuk berpikir kritis dipengaruhi oleh internalisasi nilai Demokrasi Pancasila. Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pelajaran teoretis, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong siswa untuk mengembangkan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap keadilan sosial melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial dan berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Fausta et al., 2025).

Cara siswa menyelesaikan konflik juga menunjukkan perilaku demokratis karena ketika mereka mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam konteks, mereka cenderung menggunakan komunikasi dan mediasi yang damai daripada melakukan kekerasan atau perundungan. Menurut penelitian, mengajarkan siswa untuk menghargai satu sama lain dan menyelesaikan perbedaan secara hormat dan adil dapat membantu mengurangi perilaku pelecehan (Eka Fauziah Pratiwi 1, 2021). Dampak ini sangat besar dalam menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk pertumbuhan intelektual. Pada akhirnya, profil siswa yang berintegritas dibuat oleh kombinasi sikap kritis dan tanggung jawab sosial. Mereka adalah generasi yang berani menyuarakan kebenaran namun tetap bijaksana, dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap masalah bangsa. Dengan memiliki kedua kualitas ini, siswa tidak hanya siap menghadapi tantangan akademis tetapi juga siap menjadi pemimpin masa depan yang bijaksana dan peduli yang mampu menjaga demokrasi Indonesia tetap hidup.

4. Tantangan dan Relevansi di Era Digital

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, internalisasi nilai Demokrasi Pancasila saat ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Di era digital, terjadi perubahan besar dalam cara siswa berpikir, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Ruang digital menawarkan banyak kesempatan untuk kebebasan berbicara, namun juga menghadirkan tantangan yang dapat merusak prinsip demokrasi jika tidak diatasi dengan hati-hati.

Fenomena banjir informasi, yang sering bercampur dengan berita bohong (hoaks), kebencian, kebencian, dan polarisasi opini, merupakan tantangan utama yang muncul di era modern. Kebebasan diartikan sering disalahartikan sebagai kebebasan untuk menghujat atau memberi pengertian kepada orang lain di media sosial. Lingkungan digital yang kompetitif ini dapat menjaga kesadaran siswa tentang saling menghormati dan musyawarah. Siswa rentan terjebak dalam arus informasi yang terpecah belah dan mengancam semangat persatuan nasional jika mereka tidak diberi bimbingan yang kuat melalui pendidikan Pancasila. Internalisasi nilai-nilai ini di era informasi yang menghadapi tantangan seperti polarisasi dan hoax. Namun, pendidikan Pancasila yang adaptif membantu siswa menjadi “warga negara digital” demokratis. Siswa dapat dididik untuk berpikir kritis, menyaring informasi secara rasional, dan menghargai berbagai perspektif dan identitas di ruang publik digital melalui pelatihan etika berkomunikasi di media sosial. Ini adalah komponen penting dari praktik demokrasi digital saat ini (Khoerunnisa et al., 2025).

Selain itu, era informasi memungkinkan demokrasi menjadi relevan melalui partisipasi yang lebih luas. Sekarang siswa memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat untuk menyuarakan keinginan mereka. Pendidikan di sekolah sangat penting untuk memastikan partisipasi digital ini dilakukan dengan bertanggung jawab. Dengan pemahaman konsep yang kuat, siswa dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengajar, mendukung kemanusiaan, dan mendorong solidaritas sosial. Oleh karena itu, teknologi tidak lagi menjadi ancaman bagi demokrasi; sebaliknya menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi dengan cara yang lebih efisien dan kontemporer. Secara umum, internalisasi ini menghasilkan generasi yang memiliki “kecerdasan kewarganegaraan”. Mereka tidak hanya memahami sistem politik dengan baik, tetapi mereka juga memiliki sifat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (Khoerunnisa et al., 2025).

Terakhir, keberhasilan internalisasi nilai-nilai demokrasi di era digital sangat bergantung pada kemampuan sekolah untuk menyesuaikan program pendidikan mereka dengan perubahan zaman. Sekolah harus memiliki kemampuan untuk menggunakan ruang digital mereka sebagai laboratorium baru untuk pembelajaran praktis. Siswa akan tumbuh menjadi generasi yang mahir secara teknologi dan memiliki kepribadian nasional dengan mengajarkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial secara digital. Sejauh mana Demokrasi Pancasila berguna di masa depan tergantung pada seberapa baik nilai-nilai luhur ini dapat diterapkan pada perilaku digital yang baik, cerdas, dan tetap menjaga rasa persaudaraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah merupakan proses yang strategis dan berkelanjutan dalam pembentukan karakter peserta didik. Internalisasi nilai demokrasi tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi secara teoretis, tetapi harus diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum, metode pembelajaran, serta budaya sekolah. Kurikulum Merdeka, melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penguatan Profil Pelajar Pancasila, memberikan ruang yang relevan untuk menghidupkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila agar dapat dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Proses internalisasi nilai Demokrasi Pancasila terbukti lebih efektif ketika didukung oleh metode pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual, seperti Problem Based Learning, Project Based Learning, simulasi, role playing, serta diskusi deliberatif. Metode-metode tersebut mampu mengubah ruang kelas menjadi laboratorium demokrasi yang memungkinkan siswa berlatih musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, berpikir kritis, dan bertanggung jawab secara sosial. Selain

itu, transformasi peran guru sebagai fasilitator dan teladan demokrasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan internalisasi nilai, karena sikap dan perilaku guru secara langsung membentuk pengalaman belajar dan pola pikir demokratis peserta didik. Di era digital, internalisasi nilai Demokrasi Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait kebebasan berpendapat, arus informasi, dan etika komunikasi di ruang digital. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila di sekolah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penguatan literasi kewarganegaraan digital yang berbasis nilai Pancasila. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan kewarganegaraan, sikap kritis, tanggung jawab sosial, serta kemampuan menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, internalisasi nilai Demokrasi Pancasila melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila tetap relevan dan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar guru Pendidikan Pancasila terus mengembangkan strategi pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Sekolah perlu membangun budaya demokratis yang konsisten melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler agar nilai-nilai Demokrasi Pancasila tidak hanya diajarkan, tetapi juga dialami secara nyata oleh peserta didik. Selain itu, pembuat kebijakan pendidikan diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pelatihan guru, penguatan kurikulum, serta kebijakan yang mendorong praktik pembelajaran demokratis di sekolah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris melalui penelitian lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi dan dampak internalisasi nilai Demokrasi Pancasila terhadap perilaku siswa di berbagai jenjang pendidikan.

REFERENSI

- Alifia Hesty Yulita Putri, Ambiro Puji Asmaroini, & Hadi Cahyono. (2025). Integrasi Nilai Demokrasi Dalam Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Alpha. *Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 50-56. <https://doi.org/10.36985/g047x469>
- Annisa Dwi Hamdani1, D. A. (2021). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KEHIDUPAN BERSOSIALISASI DAN MEMBANGUN KARAKTER BANGSA PADA SISWA SEKOLAH DASAR. *Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 105-119.
- Aris Tantowi, A., & Widiyanto, S. (2024). Literasi Digital Sebagai Alat Untuk Mengedukasi Siswa SMA dalam Menangkal Penyebaran Hoaks di Media Sosial. *MULTIPLE Journal OfGlobal and Multidisciplinary*, 2(2), 4124-4132. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>
- Astuti, W. S., & Wibawa, S. (2025). Implementation of PJBL to Instill Values of Tolerance and Cultural Diversity in Elementary School Students. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 10(1), 141-151. <https://doi.org/10.26618/jed.v10i1.17199>
- Aulia, A. S., & Dewi, D. A. (2022). Peran Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme dan Patriotisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *Journal on Education*, 4(4), 1097-1102. <https://doi.org/10.31004/joe.v4i4.514>
- Eka Fauziah Pratiwi 1 *, S. S. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila. *JURNAL BASICEDU*, 5472 - 5480.

- Faslia, dkk. (2023). *Jurnal basicedu*. 7(6), 3895–3904.
- Fausta, S., Pamungkas, A., Noviandi, D. F., Rasyid, A., & Manik, E. M. (2025). *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Pancasila: Strategi dan Implementasi Building National Character Through Pancasila Education: Strategy and Implementation*. 1–8. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_1101/37173/implementasi-keterbukaan-informasi-publik-hubungan-masyarakat
- Gea, R., Harefa, A., Lase, B. P., Otniel, H., & Harefa, N. (2026). *Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Nias, Indonesia*.
- Giawa, L. (2024). Penanaman Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Ppkn Di Smp. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 37–51. <https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.1770>
- Hadi, W. (2021). Penerapan Metode Problem Based Learning pada Pembelajaran PPKn untuk Membangun Budaya Demokrasi Siswa. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 2001–2021. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.330>
- Khoerunnisa, Yuliani, D. M., Maryam, D. P., Selvi, R., & Natasya. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Etika Digital Siswa Sd Di Era Media Sosial. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(September), 167–186.
- Lusiani, S. (2025). Peran Guru dalam Menumbuhkan Rasa Empati Pada Siswa Sekolah Dasar dengan Metode Role Playing. *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*, 5(2), 725–734. <https://doi.org/10.52690/jitim.v5i2.961>
- Malaka Safrizal, S. R. M. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 131–137.
- Mohamad Januar Supriyatno Januar, R. A. R. N. (2020). Pengaruh Nilai-nilai Pancasila Bersosial Di Era Digital. *Jurnal Global Citizen Jurnalilmiah*, 9(2), 51–62.
- Novitasari, I. (2023). *Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL), Konvensional , Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas II SDN Tandes Kidul I / 110 Surabaya pembelajaran . Salah satunya model Project Based Learning (PjBL). Model Project Based Learning (PjBL) merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek sebagai metode pembelajaran . Para peserta didik bekerja secara nyata , seolah-olah ada di dunia yang biasanya diberikan di dalam pembelajaran atau sebagai tugas rumah . Tugas rumah*. 3(April), 49–60.
- Nurhadianto, N. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 44. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1618>
- Putri, G., Adellia, A., Putri, M. D., Hudi, I., Srihayuning, W., & Yulianingsih, I. (2024). Menilai Efektivitas Program Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Demokrasi. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(6), 219–224. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i6.2381>
- Rahman, A., & Irayanti, I. (2025). The Pancasila Deliberation Model: A Framework for Fostering Democratic Citizenship in Civic Education. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 41–58. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v7i1.18530>
- Rizki Ramdani, Dinie Anggraeni Dewi, Y. F. F. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA* ..., 5(3), 9034–9038. <https://jurnal.stkippgritrenggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/view/102%0Aht>

[tps://jurnal.stkippgitrenngalek.ac.id/index.php/dewantara/article/download/102/66](https://jurnal.stkippgitrenngalek.ac.id/index.php/dewantara/article/download/102/66)

- Rosfiani, O., Wahyuni, S., Irawan, M. D., Nurdianto, W., & Mandala Guna, A. P. (2024). Problem-Based Learning in Civics Education (PKN): A Classroom Action Research in Indonesia. *EDUTREND: Journal of Emerging Issues and Trends in Education*, 1(3), 176–185. <https://doi.org/10.59110/edutrend.303>
- Salsabila, S. A. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 64–68. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v6i2.5075>
- Sari, E., Hestiana, I., & Nurlita, R. (2024). Membangun Pengetahuan dan Sikap Toleransi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.451>
- Septiani, B. D., & Kurniawan, M. W. (2022). Internalization Of Pancasila Values Based On School Culture. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 486–501. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i3.8107>
- Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono, B. (2024). Digital Citizenship Education: Pancasila As A Source of Digital Ethics in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(1), 70–83. <https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721>

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

